BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkualitas, sumber daya manusia yang dibentuk menjadi individu mampu mengembangkan dirinya menjadi terampil dan cerdas serta tidak hanya dalam ilmu pengetahuan akan tetapi melainkan karakter. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara wajib membiayai pendidikan dasar dan menengah. Dalam rangka mewujudkan amanat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembiayaan pendidikan, salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nomor 4 Tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat yang bertujuan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana wajib belajar. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai dana operasional untuk mendukung biaya praktik kerja, pengadaan alat, bahan dan peningkatan mutu lulusan kerja peserta didik. Lingkup Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dana BOS memegang peran penting dimana SMK membutuhkan biaya operasional yang relatif lebih tinggi dibandingkan sekolah umum karena kebutuhan akan peralatan praktik, bengkel, laboratorium, kerja sama industri serta fasilitas pembelajaran berbasis kompetensi kejuruan.

Program dana BOS muncul sejak bulan juli tahun 2005. Program BOS diberikan demi tercapainya program wajib Belajar Pendidikan dasar (WAJAR DIKDAS) 9 TAHUN. Dana tersebut digunakan untuk membiayai dana operasional dan non operasional sekolah. Tujuan umum dana BOS adalah mewujudkan Layanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan dukungan finansial yang krusial untuk operasional sekolah memungkinkan mampu menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, setiap satuan pendidikan penerima dana BOS diwajibkan untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel.

Prinsip akuntabilitas penting untuk pengelolaan keuangan di sekolah. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada principal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas dalam BOS Merujuk pada kewajiban pihak yang mengelola dana sekolah dan kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai regulasi kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah harus baik karena menunjukkan bahwa sekolah sebagai pelaksana pendidikan yang melaksanakan tugasnya dan berkinerja dengan baik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan akuntabel.

Menurut (Mahmudi:2011) Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dalam BOS merupakn keterbukaan sekolah dalam merencanakan, menggunakan, dan melaporkan dana yang diterima dari pemerintah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berkepentingan (orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah). Sekolah melakukan sosialisasi secara bersama untuk melakukan pembuatan anggaran sekolah (RAPBS) dan di akhir tahun ajaran sekolah akan membuat laporan keuangan yang harus diketahui oleh pihak internal maupun eksternal. Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana BOS melibatkan proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana harus terbuka dan dapat diakses khususnya oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pengelolaan dana BOS membutuhkan pertanggung jawaban sesuai dengan aturan yang ada agar dapat meningkatkan kepercayaan publik dibutuhkan akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas dan transparansi merupakn

suatu hal yang saling terkait karena penerapan akuntanbilitas sangat memerlukan transparansi (Andreani & Syafina, 2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BOS sebagai sistem pengelolaan keuangan sekolah yang terbuka, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (orang tua, komite, pemerintah) melalui pelaporan rutin, yang melibatkan *stakeholder* sekolah dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban supaya terhindar dari penyimpangan dan dapat membangun kepercayaan yang baik. Lembaga pendidikan diberikan tanggung jawab oleh pemerintahsecara mandiri dana bantuan operasional sekolah agar dana tersebut tepat sasaran dan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Selain itu kenaikan jumlah dana BOS dari setiap tahunnya diharapkan diharapkan menjadi program bantuan tersebut sebagai pondasi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan mampu membantu peserta didik yang tidak mampu supaya terhindar dari segala bentuk pungutan dalam biaya pendidikan.

Pendidikan tidak ditempatkannya sebagai prioritas terpenting karena masyarakat indonesia mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk kepentingan pribadi dalam segala hal. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah mempunyai keterkaitan yang dibuktikan secara signifikan memengaruhi kinerja pemerintahan denganyang didasarkan pada pengorganisasian sekolah, pertanggungjawaban yang menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan kinerja manajemen sekolah (Aprilia, R., & Saptantinah, D, 2025). Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan semua pihak yang terkait. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa. Sekolah menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jadi pihak-pihak tertentu dapat mengetahui kemana saja dana sekolah dibelanjakan Sekolah menengah kejuruan SMK Sunan Kalijaga Ponorogo merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS di tahun ini.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai program pemerintah untuk membiayai operasional satuan pendidikan sebagai perwujudan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. BOS mempunyai tujuan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah, sehingga layanan pendidikan dasar dan menengah dapat berjalan dengan baik tanpa membebani siswa maupun orang tua,

dimana dalam pengelolaannya prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal utuh diterapkan pada setiap sekolah (Hasmiati, Darmanto & Titi Darmi, 2025). Biaya operasional sekolah menjadi salah satu hal penting dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah termasuk usaha sekolah dalam memenuhi keperluan investasi, operasional dan personal (Rusman & Muhammad Yahya, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya mencakup aspek keuangan semata, melainkan mencakup akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Sementara transparansi dalam pengelolaan keuangan publik menunjukkan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan secara mudah dan tepat waktu. Kedua prinsip ini merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan berbasis *good governance*.

Jenjang pendidikan SMK, pengelolaan dana BOS menjadi tantangan tersendiri mengingat kompleksitas program pembelajaran kejuruan yang membutuhkan berbagai jenis belanja yang beragam. Kepala sekolah sebagai pengelola dana BOS dituntut untuk memiliki kompetensi manajerial yang memadai, termasuk pemahaman tentang regulasi pengelolaan dana BOS, kemampuan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta kemampuan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat dan transparan. Tidak jarang ditemukan bahwa sebagian pengelola dana BOS di tingkat sekolah masih belum sepenuhnya memahami mekanisme pengelolaan yang sesuai regulasi. Manajemen anggaran sekolah mempunyai tantangan anggaran yang memiliki sifat yang masih dilema dalam mengambil keputusan, mengendalikan keuangan yang rentan dengan kesalahan administrasi, pelaksanaan program yang kurang optimal dan pengawasan eksternal yang masih minim (Aulia safitri et. at, 2025).

Fenomena permasalahan pengelolaan dana BOS terdapat permasalahan Ketidaksesuaian alokasi Dana dengan kebutuhan Operasional SMK Sunan Kalijaga Ponorogo yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan sekolah umum karena fokusnya pada pendidikan vokasi yang memerlukan praktik intensif. Kendala yang ada pada penyusunan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (Arkas) tentang administrasi dan perencanaan yang mana terdapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) persentase penggunaan untuk komponen tertentu (misalnya honor guru yang dipakai untuk dana honor 30% tetapi realitanya membutuhkan lebih dari hitungan misalnya berjumlah 300 ribu data di aplikasi tetapi realitanya 400 ribu. Perlunya penyesuaian penyusunan arkas untuk mengelola dana

BOS harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis, ketelitian dan pemahaman dalam memastikan kelancaran, sekolah sangat disarankan untuk tidak menyalin dan menyamakan anggaran dari tahun sebelumnya menghindari kesalahan anggaran yang tidak relevan (Wawancara dengan Bendahara Sekolah Reni Setyowati, 15 Desember 2025).

Dana BOS di SMK Sunan Kalijaga Ponorogo perlu segera diatasi agar pendidikan vokasi dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja serta memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan (Bastaian Indra, 2007). Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan semua pihak yang terkait. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa dimana sekolah menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jadi pihak tertentu dapat mengetahui dana sekolah dibelanjakan.

Penerapan prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan terutama dalam pengelolaan dana BOS dibutuhkan untuk laporan penggunaan dana BOS menjadi berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Dimas Suliyanto, 2020). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS mengacu pada kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pihak yang berwenang. Sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedua prinsip ini menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan dana BOS yang transparan memperkuat posisi sekolah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa (Dian Sartika, Masduki & Heni Rochimah, 2025).

Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di beberapa SMK. Permasalahan akuntabilitas dapat muncul dari berbagai faktor antara lain kurangnya pemahaman pengelola dana terhadap regulasi yang berlaku, minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, beban kerja operator sering mengalami banyak sistem pelaporan, orang tua siswa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kebutuhan sekolah, serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait.

Sementara itu, permasalahan transparansi dapat bersumber dari budaya organisasi yang tertutup, rendahnya kesadaran akan hak publik untuk mengetahui penggunaan dana, Komite sekolah yang seharusnya menjadi pengawas dari pihak masyarakat tidak berfungsi secara optimal. Keterlibatan dalam pengawasan dan pengesahan penggunaan dana BOS masih lemah yang bersifat fromalitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Imeldania P.S, Cahyaningdyah D & Martono S (2026) dengan judul Problematika Pengelolaan Pembiayann Pendidikan di Indonesia: Systematic Literature review terhadap Efektifikats, Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan menunjukkan permasalahan pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan adanya dana tetapi dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan pendidikan dan perencanaan anggaran belum seutuhnya sesuai dengan kebutuhan, dimana penggunaan dana masih terpacu pada administratif, keterbuklaan keangan belum bagus dan akuntabilitas berfokus pada pelaporan dibandingkan pengukuran dampak pengunaan dana, sehinggaa pengelolaan pembiayaan pendidikan dapat diarahkan pada tata kelola yang yang lebih efektif supaya dana pendidikan bisa mmeberikan konmtribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dehi Nur C, Ibrahim Z & Blongkod H. (2026) dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Penglolaan dana Babntuan Operasional Sekolah terhadap Efektifitas Penggunaan Dana BOS di Sekolah Menengah Atas Gorontalo hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS, yang ditunjukkan oleh nilai Critical Ratio (C.R.) sebesar -1,920 dan nilai probabilitas (p) lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS dengan nilai C.R. sebesar 4,457 dan nilai p lebih kecil dari 0,05 keterbukaan informasi yang bersifat administratif belum mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana secara optimal tanpa adanya partisipasi aktif serta pemahaman yang memadai dari para pemangku kepentingan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Haryani Linna & Setyowati Hasanah (2026) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Taransparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMKN 4 Yogyakarta hasil penelitian menunjukkan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, Transparansi pengelolaan Dana BOS diterapkan melalui publikasi informasi penggunaan dana pada papan pengumuman dan

website sekolah sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka.

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan menjadi penting untuk dilakukan mengingat SMK Sunan Kalijaga Ponorogo memiliki karakteristik khusus dengan kebutuhan pendanaan yang berbeda dari sekolah umum lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyo Dian B, et. Al, 2026) efektivitas pengelolaan dana BOS bergantung pada tiga faktor yaitu transparansi, akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola dimana transparansi berkontribusi 51,2%, akuntabilitas 52,7% dan transparansi masyarakat 53,9% terhadap mutu pendididkan dengan pengaruh simultan 62,9%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rajufillah Ye'Zalwa & Martiningsih Sri, 2026) menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS, sementara transparansi yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan efektivitas akibat meningkatnya beban administratif.

Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperlukan adanya tanggung jawab dan pengawasan yang ketat dan menjadi fondasi tata kelola yang baik, membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan publik dengan memastikan penggunaan dana dan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Mengatasi permasalahan pengelolaan dana BOS yang terjadi di SMK Sunan Kalijaga Ponorogo peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SMK Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SMK Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Akuntabilitas dan Transaparansi Pengelolaan Dana BOS di SMK Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SMK Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Akuntabilitas dan Transaparansi Pengelolaan Dana BOS di SMK Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.
2. Manfaat Praktis

   Sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengelolaan dana yang ada, sehingga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS di masa mendatang.